

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kuantitas sumber daya manusia yang besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 adalah 247.428.598 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah bagaimana menumbuhkembangkan penduduk yang ada agar semua kebutuhan terpenuhi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) diketahui bahwa pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Kondisi kemiskinan yang terjadi tentunya harus segera ditangani dengan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan meningkatkan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan sebuah topik yang tak henti-hentinya menjadi perbincangan hangat di beberapa negara, bahkan bukan hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Pendidikan dianggap sebagai sentral dari pembangunan karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu penentu perkembangan negara. Bahkan di beberapa negara pendidikan mencapai puncak popularitas dengan menjadi prioritas utama pembangunan negara. Tidak terkecuali Indonesia, negara kita yang makmur dan subur perkembangan bidang pendidikannya masih terhambat.

Paradigma baru pendidikan telah berpihak pada komitmen masa depan manajemen lembaga yang “bermutu” proses pembelajarannya dan “bermutu” lulusannya, sehingga mampu memberikan nilai lebih bagi bangsa dan negara. Terlebih dengan adanya sistem otonomi pendidikan, setiap daerah dituntut memiliki Lembaga Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (LPSDM) yang handal, sehingga andalan utama untuk mengantarkan masyarakat ke iklim “sejahtera dengan kemandiriannya” dapat diwujudkan. Rapuhnya fundamental

perekonomian nasional saat ini masih menuntut adanya suatu langkah perbaikan yang komprehensif, karena tantangan ke depan yang akan dihadapi sangatlah berat dan membutuhkan kerja keras dari semua elemen bangsa.

Perubahan yang cepat dibarengi dengan revolusi teknologi komunikasi berdampak pada semua bidang kehidupan masyarakat yang serba kompetitif, kebutuhan akan *skill* semakin beraneka ragam namun tetap tidak mengesampingkan mutu dan kualitas yang diharapkan. Perubahan yang cepat tersebut, hanya dapat diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki kualitas dan SDM sebagai motor yang selalu memegang teguh komitmen dan selalu meningkatkan kompetensi dirinya.

Merujuk pada pernyataan di atas dan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), dinyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32% atau 7,61 juta orang. Kepala BPS Suryamin mengatakan “angka persentase pengangguran 6,32% di Februari 2012 menurun jika dibandingkan pada Agustus 2011 sebesar 6,56% dan Februari 2011 sebesar 6,8%”. Jadi, jumlah pengangguran pada Februari 2011 adalah 8,12 juta, Agustus 2011 adalah 7,7 juta, dan Februari 2012 adalah 7,61 juta, terus menurun.

Namun, jika dilihat dari persoalan kemiskinan Data Susenas September 2012 menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin terbesar masih berada di pulau Maluku dan Papua sebesar 24,14%, sementara persentase penduduk miskin terendah berada di pulau Kalimantan sebesar 6,48%. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (15,82 juta orang), sementara jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (932 ribu juta orang).

Upaya jalur pendidikan dalam berkontribusi menekan permasalahan pengangguran dan kemiskinan terus dilakukan dan dikembangkan melalui berbagai program di masyarakat. Hal ini telah diatur oleh pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan Nasional melalui UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa “jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Artinya, ketiga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan layanan pendidikan kepada masyarakat. Khusus

berkaitan dengan jalur pendidikan nonformal ditegaskan pada pasal 26 ayat (1) bahwa “pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Untuk itu, pendidikan nonformal harus mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mendapat pendidikan melalui jalur formal.

Satuan pendidikan nonformal sebagaimana disiratkan dalam regulasi jalur pendidikan di atas, memiliki peranan penting berkontribusi dalam pembangunan. Upaya tersebut diperankan melalui berbagai program dan satuan pendidikan yang diselenggarakan di masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU 20 tahun 2003 Pasal 26 ayat 4 bahwa “Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”. Satuan pendidikan yang mewadahi program pembelajaran masyarakat, memiliki karakter kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, seperti lembaga kursus yang memiliki keterikatan terhadap peningkatan kemampuan keterampilan fungsional maupun kejuruan/vokasional, sebagai satuan pendidikan yang mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai penyelenggara pendidikan non formal diharapkan mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional.

Berkembangnya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Indonesia memberikan makna bahwa kursus dan pelatihan semakin dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jenis-jenis kursus semakin banyak, semakin berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan kebutuhan masyarakat.. Teknologi baru memerlukan pemahaman baru agar manusia dapat memanfaatkannya dalam kehidupan. Program-program kursus baru bermunculan seiring dengan berkembangnya informasi dan teknologi. Banyak lembaga kursus beralih menyelenggarakan program-program baru yang lebih diminati masyarakat. Lembaga-lembaga baru juga bermunculan menambah maraknya bisnis kursus dan pelatihan di Indonesia.

Lembaga kursus perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. LKP yang dikelola secara profesional akan berdampak positif pada para pemangku kepentingan khususnya para peserta didik dan masyarakat industri yang menyerap keluaran dari lembaga LKP. LKP yang baik merupakan aset pemerintah karena mereka merupakan mitra dalam menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan oleh masyarakat industri. LKP perlu mengembangkan program kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan program, termasuk melakukan penelusuran alumni.

Tumbuh dan berkembangnya kursus di tengah-tengah masyarakat memberikan banyak solusi dari persoalan keterampilan hidup. Kondisi banyak atau tidaknya LKP tentu tidak saja dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, namun perlu juga berdampingan dengan kondisi mutu lembaga kursus dalam menyikapi kebutuhan atau keterampilan masyarakat. Sejauh mana data kuantitatif tersebut dapat berbicara dan menggambarkan lembaga mutu yang profesional dengan mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan lembaga.

Jumlah kursus dan jenis kursus yang begitu besar merupakan aset yang sangat penting dan strategis bagi Pemerintah dalam pemerataan dan memperluas akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sehingga mereka mampu mengisi pasar kerja lokal, nasional, dan internasional. Sebagai bukti terhadap upaya pemerataan dan percepatan pendidikan di masyarakat (*Education for All*), bentuk nyata terhadap pendidikan sepanjang hayat (*Life Long Education*), dan sejalan dengan UU 20 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14 tahun 2005, dan PP 19 tahun 2005 maka dipandang perlu untuk menggambarkan mutu lembaga kursus, karena lembaga kursus telah memberikan kontribusinya dari tahun ke tahun.

LKP harus selalu memperbaiki pengelolaannya dalam bentuk evaluasi berbasis kinerja sehingga dapat terbangun sistem pendidikan dan pelatihan yang terstandar dan dapat menjamin mutu layanan LKP serta menghasilkan *output* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Standar pengelolaan LKP perlu dibangun untuk mewujudkan LKP berstandar nasional.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan adalah dengan adanya kebijakan penilaian akreditasi bagi program dan lembaga penyelenggara pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Akreditasi merupakan salah satu dari program pemerintah dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memperhatikan 8 standar pendidikan yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, pengelolaan dan penilaian.

Akreditasi adalah salah satu usaha tuntutan pembaharuan sistem pendidikan untuk mencapai lembaga pendidikan yang berkualitas, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Selain itu penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; dan pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna. Tujuan akreditasi kursus adalah untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan LKP atas dasar standar Nasional pendidikan dengan kriteria yang bersifat terbuka. Manfaat dari akreditasi antara lain untuk meningkatkan mutu program dan satuan pendidikan LKP, sebagai umpan balik dalam memberdayakan dan mengembangkan kinerja LKP serta membantu pemerintah mendapatkan informasi agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada LKP. Dengan adanya akreditasi ini, maka dapat mendorong LKP agar selalu berupaya meningkatkan mutu program dan lembaganya secara bertahap, terencana dan kompetitif di tingkat Kota atau Kabupaten, Provinsi, Nasional dan bahkan Internasional.

Lembaga kursus dan pelatihan non formal memiliki kelayakan program dan setara dengan pendidikan formal, maka lembaga tersebut harus mendapat akreditasi dari BAN PAUD dan PNF. Untuk mengupayakan hal tersebut BAN

PAUD dan PNF juga memberikan sosialisasi terhadap lembaga-lembaga yang belum terakreditasi agar lembaga tersebut mendapatkan akreditasi. Dinas Pendidikan Kota Bandung telah memfasilitasi agar lembaga-lembaga kursus di kota Bandung dapat diberikan sosialisasi secara merata, dengan begitu pengelola dapat termotivasi dalam melaksanakan akreditasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Maulindar (2016) mengenai “Analisa Pengaruh Komponen Akreditasi terhadap Prestasi Kerja Lembaga Kursus dan Pelatihan di Soloraya” menunjukkan bahwa komponen standar akreditasi baik secara sendiri maupun secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan di Soloraya. Prestasi kerja LKP yang mengalami peningkatan berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah kemampuan LKP dalam meningkatkan daya saing para alumnusnya, kejelasan akan program yang diselenggarakan, kompetensi dasar, standar kompetensi, bobot materi dan lainnya yang berhubungan dengan hasil capaian terhadap materi pembelajarannya, mampu membuat komposisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga proses pembelajaran dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas, profesional dan berdaya saing. Kemampuan mengelola tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan penguji yang memenuhi kriteria standar dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terhadap peserta didiknya dengan optimal, mampu memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap proses pembelajaran. Sistem Informasi Manajemen yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan kebijakan LKP terhadap pihak lain, berkomitmen dalam pengelolaan program – program kursus, telah melakukan standar pembiayaan dengan baik, serta membuat system penilaian dengan baik, sehingga mampu meningkatkan prestasi kerja LKP sebagai sebuah standar yang harus dikerjakan.

Suryana (2007) dalam artikelnya mengenai “Akreditasi, Sertifikasi dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan” menjelaskan bahwa akreditasi & sertifikasi diharapkan dapat memberikan percepatan pada pencapaian mutu pendidikan. Variasi mutu yang ada dapat diarahkan pada pencapaian yang sama melalui *benchmark* sebagai pagu bagi pelaksanaan dengan standarisasi yang sama sehingga memperoleh hasil yang kompetitif.

Beberapa penelitian lainnya yang mengkaji mengenai hubungan antara akreditasi dengan mutu layanan dan kualitas lulusan diantaranya penelitian Indriyani (2017) mengenai “Pengaruh Akreditasi Sekolah terhadap kualitas lulusan SMA se-kota Jambi tahun 2017” menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara akreditasi terhadap kualitas lulusan SMA se-kota Jambi tahun 2017 yang ditunjukkan oleh nilai T_{hitung} sebesar $3,844 > T_{Tabel}$ 1,71.

Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai akreditasi dan hubungannya dengan kualitas layanan khususnya pada bidang kesehatan, sedangkan kajian mengenai hubungan akreditasi dengan kualitas layanan pendidikan dan kualitas lulusan lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan non formal masih sangat terbatas. Hal ini sesuai dengan kondisi lembaga penyelenggara pendidikan non formal khususnya lembaga kursus dan pelatihan yang masih kecil persentase keikutsertaannya dalam penilaian akreditasi.

Di kota Bandung sendiri telah banyak lembaga kursus yang berdiri tetapi masih banyak lembaga yang masih belum terakreditasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kota Bandung yang tercatat berdasarkan data dapodik sebanyak 152 Lembaga yang tersebar dari 30 kecamatan. Dari 152 lembaga kursus tersebut yang telah mengikuti penilaian akreditasi oleh BAN PAUD PNF dari tahun 2015 sampai 2018 hanya 46 lembaga, artinya hanya 30,26% saja lembaga kursus yang sudah diakreditasi. Data lengkap dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.1

Status Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kota Bandung

KATAGORI LKP	JUMLAH
Total LKP di Kota Bandung	152
LKP sudah diakreditasi	46
LKP belum diakreditasi	106

KATAGORI LKP	JUMLAH
LKP Terakreditasi dengan Nilai A	5
LKP Terakreditasi dengan Nilai B	13
LKP Terakreditasi dengan Nilai C	8
LKP Terakreditasi (tanpa Nilai)	16
LKP Tidak Terakreditasi	4

Dibandingkan dengan satuan pendidikan non formal lainnya seperti PKBM dan PAUD, keikutsertaan LKP khususnya di Kota Bandung dalam penilaian akreditasi tergolong sangat rendah. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong keikutsertaan LKP dalam penilaian akreditasi oleh BAN PAUD PNF, diantaranya dengan melakukan sosialisasi terkait akreditasi, bimbingan teknis sampai pembimbingan persiapan penilaian LKP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ajrina (2016) mengenai “Pengaruh Sosialisasi Program Akreditasi terhadap Motivasi Pengelola untuk Menyiapkan Akreditasi Program pada Satuan Pendidikan LKP di Kota Bandung” bahwa kegiatan sosialisasi program akreditasi berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi pengelola kursus untuk menyiapkan akreditasi program.

Banyak kendala yang dihadapi yaitu salah satunya kurangnya kesadaran dari pengelola lembaga kursus untuk dapat berusaha agar lembaganya mempunyai akreditasi terutama dalam menempuh prosesnya. Rendahnya keikutsertaan LKP dalam penilaian akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD PNF) menjadi pertanyaan besar bagi penulis. Apa yang menyebabkannya? Mungkinkah karena pengelola LKP tidak merasakan manfaat dari penilaian akreditasi, atau pengelola LKP memandang akreditasi bukan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan? Ataukah pengelola LKP memandang tidak ada dampak akreditasi terhadap kompetensi lulusan?. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan pendidikan lembaga kursus terhadap kompetensi lulusan dilihat dari status akreditasi lembaga kursus dan pelatihan.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan studi pendahuluan ditemukan fenomena sebagai berikut:

1. Di kota Bandung terdapat 152 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Bandung dan tersebar di 30 kecamatan.
2. Dari 152 lembaga yang terdaftar yang sudah mengikuti penilaian akreditasi BAN PAUD PNF sebanyak 46 lembaga dengan sebaran hasil akreditasi: 5 LKP memperoleh nilai A; 13 nilai B; 8 nilai C; 16 LKP Terakreditasi; dan 4 LKP Tidak Terakreditasi (TT).
3. Seluruh lembaga kursus yang terdaftar di Kota Bandung (152 lembaga) merupakan lembaga swasta. Sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan kualitas layanan yang diberikan lembaga kursus akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat untuk membeli jasa pendidikan yang ditawarkan.
4. Kompetensi lulusan lembaga kursus dan pelatihan menjadi bekal bagi para lulusan untuk bersaing dan siap memasuki dunia kerja.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas layanan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di Kota Bandung berdasar pada status akreditasinya?
2. Bagaimana kompetensi lulusan lembaga kursus berdasar pada status akreditasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh kualitas layanan pendidikan lembaga kursus (LKP) di Kota Bandung terhadap kompetensi lulusan?
4. Bagaimana pengaruh kualitas layanan pendidikan lembaga kursus (LKP) di Kota Bandung terhadap kompetensi lulusan berdasar pada status akreditasi lembaga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kualitas layanan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di Kota Bandung berdasar pada status akreditasinya.
2. Mengetahui kompetensi lulusan berdasar pada akreditasi lembaganya
3. Mengetahui pengaruh kualitas layanan pendidikan lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) terhadap kompetensi lulusan
4. Mengetahui pengaruh kualitas layanan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) terhadap kompetensi lulusan berdasar pada status akreditasi lembaga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritik

Secara teoritis, penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh dari *penilaian akreditasi terhadap kualitas layanan dan kompetensi lulusan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang ada di kota Bandung*. Hasil penilaian akreditasi merupakan hasil potret penyelenggaraan program kursus dan pelatihan pada delapan standar pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi referensi keilmuan dalam bidang pendidikan non formal dan berkontribusi khusus bagi pengelola lembaga kursus dan pelatihan dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan. Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Melengkapi referensi keilmuan terkait kualitas layanan pendidikan khususnya pada lembaga kursus dan pelatihan.
2. Melengkapi referensi keilmuan terkait pengaruh kualitas layanan pendidikan lembaga kursus terhadap kompetensi lulusan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para penyelenggara dan pembina program kursus dan pelatihan untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan program kursus sesuai

delapan standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah. Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran bagi pengelola lembaga kursus mengenai kualitas layanan yang dirasakan peserta didik.
2. Memberikan gambaran bagi pengelola lembaga kursus mengenai kompetensi lulusan yang dihasilkan dibandingkan dengan kompetensi lulusan LKP lain.
3. Memberikan gambaran bagi institusi pembina lembaga kursus mengenai pengaruh kualitas layanan pendidikan lembaga kursus terhadap kompetensi lulusan.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola lembaga kursus dalam meningkatkan kualitas layanan lembaga.

1.5. Struktur Organisasi Tesis

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyajikan sistematika penulisan tesis sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika organisasi tesis.

BAB II, Kajian Pustaka, sebagai landasan konsepsi penelitian ini, mencakup konsep Pendidikan Masyarakat, konsep Kompetensi lulusan LKP, Kualitas layanan, konsep Akreditasi, Kerangka Berpikir Penelitian, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III, Metodologi Penelitian, membahas mengenai subjek penelitian, desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.

BAB IV, Temuan dan Pembahasan, meliputi: gambaran lokasi penelitian, gambaran umum sampel penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V, Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, membahas kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai hasil temuan penelitian.